

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO MELALUI PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*

Christiana Riyana Setiyawati
Manajemen / 18.12.00013

Abstract

This study aims to determine the evaluation of the financial performance of the Purworejo District Health Office through a value for money approach. This study used descriptive qualitative method. The sources of data in this study are primary data obtained directly from original sources and secondary data through the table of targets, realizations, and financial performance achievements of the Purworejo District Health Office through a value for money approach.

The results of the study found that the pattern of development of the economic level of financial management of the Purworejo District Health Office for 5 (five) years 2017-2021 was declared quite economical, namely 88.27% in 2017 because it was in the range of 80% < 90% and for 3 (three) years. 2018-2020 is declared as economical because an average of 92.47% lies in the range of 90% - 100%. However, in 2021 it was again declared quite economical at 89.54%. While the pattern of development of the level of efficiency in the financial management of the Purworejo District Health Office for 5 (five) years 2017-2021 is declared inefficient because the efficiency value is more than 100%. This is due to the existence of different work programs each year with different sources of funds even though they have minimized spending with the target. And the pattern of development of the level of effectiveness of the financial management of the Purworejo District Health Office, in 2017 - 2019 shows that the Purworejo District Health Office's performance is very effective and in 2020 it is declared effective. However, in 2021 it was again declared very effective. The greater the level of effectiveness achieved, the better the performance of the Purworejo Health Office. This is because the realization of the budget is lower than the target.

Keywords: *evaluation, financial performance, value for money*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 5 dan 6 UU No.32 Tahun 2004). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mengelola dana desentralisasi secara

transparan, baik dari sisi *input*, *output*, *impact*, dan *benefit*-nya. Menurut Budi (1994:76) pengelolaan keuangan daerah sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai berbagai program kegiatan pembangunan untuk pemerataan dan laju pertumbuhan daerah yang seimbang serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya.

Pencapaian tingkat program atau kegiatan pada organisasi pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pengelolaan keuangannya. Kinerja dari pengelolaan keuangan daerah yang optimal dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sehingga akan menimbulkan suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan serta menjamin kemandirian keuangan daerah menjadi lebih baik lagi. Indikator kemandirian dari suatu daerah berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini berarti semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD dalam APBD, dapat menunjukkan suatu kemandirian dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya manajemen keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk memajukan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan pendekatan *Value of Money* (Nilai daripada Uang). Konsep *value for money* menurut Mardiasmo (2002:4), yaitu: ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari

pemborosan pengeluaran, efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu, dan efektivitas ialah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan *outcome* serta *output*.

Penerapan *value for money* salah satunya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaan penyelenggarannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut yakni melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2017-2021, realisasi kinerja keuangan Dinas Kesehatan Purworejo mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo masih tergolong kurang signifikan yang menyebabkan rasio ekonomis masih kurang ekonomis, rasio efisien masih kurang efisien, dan rasio efektivitas masih kurang efektif. Adapun

dampak dari pengukuran tersebut berdampak langsung terhadap rencana belanja yang sudah direncanakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melalui pendekatan *value for money*?

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan

Menurut Mulyadi (2007:2), kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, serta kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Pendapat serupa dinyatakan oleh Sawir (2005:1), kinerja keuangan adalah kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan. Menurut Wiratna (2017:71), kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Sehingga setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu adanya penilain/pengukuran secara periodik.

Dalam kinerja keuangan terdapat beberapa indikator. Indikator kinerja menurut Bastian (2006:267) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*inputs*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) merupakan sesuatu yang terkait

dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (*impacts*) merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Value for Money

Value for money mempunyai pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini menjelaskan bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan dengan sebaik-baiknya (Mahmudi, 2015). *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni:

1. Ekonomi, adalah perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah. Dimana sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimal pada *input* tertentu dengan penggunaan terendah untuk mencapai target, sehingga efisiensi perbandingan *output/input*. *Output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya

yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut.

3. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, yaitu perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2017:134). Semakin besar *output* terhadap tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil (Mahmudi, 2019:86).

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada. Data realisasi dan target nantinya akan disajikan terpusat pada tahun 2017-2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *post positivism* karena menggunakan pengamatan empiris dalam rangka mengkonfirmasi dan menggali informasi terkait kinerja pengelolaan keuangan Dinas Kabupaten Purworejo.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja *value for*

money yakni memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Untuk lebih jelasnya menurut Mardiasmo (2004:4), pengukuran *value for money* ada tiga, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dijabarkan dalam LKjIP.

Langkah-langkah pendekatan *Value for money* diukur dengan cara:

1. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis adalah pengukuran yang mempertimbangkan masukan yang digunakan. Menurut Mahsun (2016:182) ekonomis merupakan ukuran relatif. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Oleh karena itu peneliti menggunakan rumus ekonomis sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian ekonomis dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Penilaian Ekonomis

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% < 90%	Cukup Ekonomis
60% < 80%	Kurang Ekonomis
< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1966

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input* (Mahmudi, 2007:7). *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah, dalam hal ini ialah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan, dalam hal ini ialah pendapatan. Maka, untuk menganalisa tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Penilaian Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% < 90%	Cukup Efisien
60% < 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1966*

Tabel 3
Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% < 90%	Cukup Efektif
60% < 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1966*

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahmudi (2007:7) suatu organisasi program atau kegiatannya dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang diharapkan. Oleh karena itu efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. *Output* dalam hal ini merupakan realisasi belanja serta target adalah target belanja. Semakin besar kontribusi *output* terhadap target maka semakin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisa efektifitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

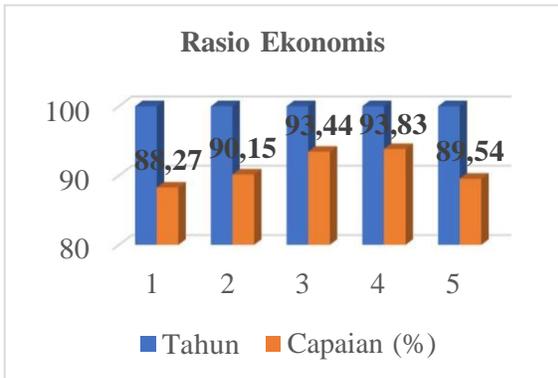
$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efektifitas dinyatakan sebagai berikut:

ANALISIS DATA

1. Pengukuran Ekonomis

Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Nilai ekonomi dari program kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.



(Sumber: LKJiP Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017-2021)

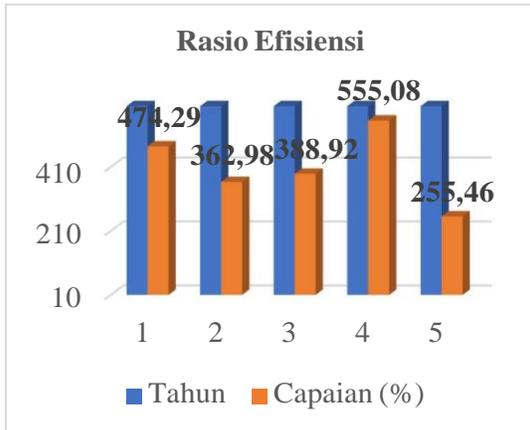
Gambar 1
Grafik Peningkatan Rasio Ekonomis
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Tahun 2017 – 2021

Pada tahun 2017 dinyatakan cukup ekonomis, kemudian selama 3 (tiga) tahun yaitu 2018 – 2020 dinilai ekonomis, dan pada tahun 2021 dinyatakan cukup ekonomis. Pada tahun 2017 realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebesar 88,27%. Kemudian pada tahun 2018 realisasi anggarannya dibandingkan dengan target adalah sebesar 90,157%. Lalu pada tahun 2019 sebesar 93,44%, pada tahun 2020 sebesar 93,83% serta pada tahun 2021 sebesar 89,54%. Semakin rendah rasio ekonomis yang diperoleh maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya penghematan belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat

ekonomis tertinggi yang dicapai pada tahun 2020, akan tetapi dari segi nilai realisasi anggaran sebenarnya mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi anggaran adalah sebesar Rp.162.688.954.776,00 namun pada tahun 2020 sebesar Rp.238.178.956.276,00 atau mengalami peningkatan sebesar 68,30%. Akan tetapi pada tahun 2021 realisasi anggaran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Sehingga untuk indikator rasio ekonomis Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sudah mencapai kinerja yang baik serta telah berhasil mengelola penggunaan anggaran dengan baik.

2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi ialah perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu kegiatan disebut efisien apabila penggunaan dana yang kecil bisa menghasilkan *output* sesuai yang diharapkan.



(Sumber: LKJiP Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017-2021)

Gambar 2
Grafik Peningkatan Rasio Efisiensi
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Tahun 2017 – 2021

Rasio efisiensi yang dihasilkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017, rasio efisiensi mencapai 474,29% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 362,98% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 388,92% serta pada tahun 2020 sebesar 555,08%. Meskipun mengalami peningkatan, tabel rasio efisiensi menunjukkan bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 255,46%. Ketidakstabilan rasio efisiensi ini menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun kinerja Dinas Kesehatan

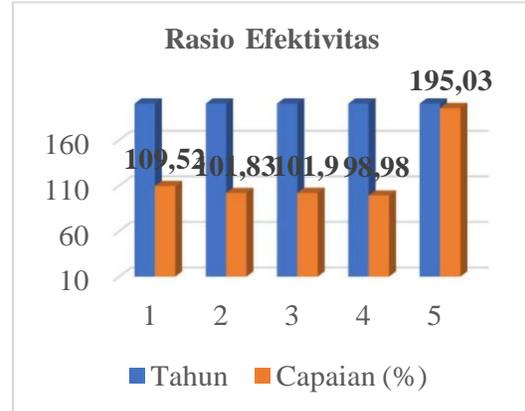
Kabupaten Purworejo dinyatakan tidak efisien.

Adapun penyebab tidak efisiensinya rasio efisiensi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo karena anggaran belanja yang ada bersumber dari berbagai pagu anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok, dan Dana Insentif Daerah. Sumber dana tersebut tidak menjadi pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, akan tetapi menjadi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo serta menjadi target belanja bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Sedangkan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Retribusi Daerah yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah retribusi pemeriksaan pada laboratorium air dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan dari pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas dan rumah sakit serta sewa rumah dinas. Besar kecilnya pendapatan tersebut dipengaruhi oleh jumlah pemeriksaan

sampel air dan jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan. Sehingga apabila realisasi belanja dibandingkan dengan realisasi pendapatan akan terjadi perbedaan yang sangat tinggi dan mengakibatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tidak efisiensi.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebab, biaya bisa saja melebihi apa yang dianggarkan bahkan dua kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga akan menjadi dasar indikator kinerja kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yaitu dengan melihat anggaran target, apakah anggaran tersebut bisa direalisasikan dengan baik untuk memenuhi pencapaian kerja yang terlaksanakan.



(Sumber: LKJiP Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017-2021)

Gambar 3
Grafik Peningkatan Rasio Efektivitas
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Tahun 2017 – 2021

Rasio efektif pada tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut: pada tahun 2017 – 2019 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah sangat efektif dan pada tahun 2020 dinyatakan efektif. Namun, pada tahun 2021 rasio efektif kembali dinyatakan sangat efektif. Semakin besar rasio efektivitas yang didapat sebuah organisasi, maka semakin baik kinerja organisasi tersebut.

PENUTUP

Simpulan

1. Pola perkembangan tingkat ekonomis pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun 2017-2021 dinyatakan cukup

ekonomis yaitu 88,27% pada tahun 2017 karena berada pada range 80% < 90% dan selama 3 (tiga) tahun 2018-2020 dinyatakan ekonomis sebab rata-rata 92,47% terletak pada range 90% - 100%. Namun, pada tahun 2021 kembali dinyatakan cukup ekonomis yaitu 89,54%.

2. Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun 2017-2021 dinyatakan tidak efisien karena nilai efisiensinya lebih dari 100%. Hal tersebut disebabkan adanya program kerja yang berbeda-beda setiap tahunnya dengan sumber dana yang berbeda pula meskipun telah meminimalisasi belanja dengan targetnya.
3. Pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, pada tahun 2017 – 2019 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah sangat efektif dan pada tahun 2020 dinyatakan efektif. Namun, pada tahun 2021 kembali dinyatakan sangat efektif. Semakin besar tingkat efektivitas yang dicapai maka semakin baik kinerja Dinas

Kesehatan Purworejo. Hal ini disebabkan realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan targetnya.

Saran

1. Agar belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tetap ekonomis, maka perlu mempertahankan penghematan belanja dengan skala prioritas dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Agar belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo bisa lebih efisien dan efektif, maka hal penting yang harus diketahui adalah pemahaman tentang konsep belanja sehingga perencanaan dan pengendalian pengeluaran menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam perencanaan sedapat mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efisien dan efektif dengan mengarahkan pada program prioritas dan memperhatikan apakah target yang telah ditetapkan sudah terealisasi dengan baik serta apakah biaya-biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa melebihi anggaran. Juga dalam pengelolaan kinerja keuangannya

berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, Dian. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money. Makassar: Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021 dari <https://core.ac.uk/download/pdf/25485944.pdf>.
- Jumingan. 2006. "Analisis Laporan Keuangan". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- LKjIP. 2019-2021. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Zain, Wardiman. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Diakses tanggal 22 Juli 2021 dari <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/10474>